

Pemprov Diminta Benahi

Sistem Administrasi

Borneo Tribune

Kamis, 22 September 2011

Yulan Mirza

Borneo Tribune, Pontianak

Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Tony menyatakan pihaknya menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Gubernur Kalbar dalam membenahi sistem administrasi yang ada di Kalbar.

Hal yang disoroti diantaranya, pengelolaan keuangan daerah oleh Bendahara Umum Daerah dan Kuasa belum memadai, penyajian saldo piutang pajak sebesar Rp 13.731.128.500 tidak andal, penyajian saldo penyediaan obat pada rumah sakit khusus Provinsi Kalbar sebesar Rp 410.848.247,07 tidak andal, penyajian saldo penyertaan modal Pemprov Kalbar pada PDAM Kalbar per 31 Desember 2010 sebesar Rp 1 miliar tidak andal,

Selain itu, lanjut Tony, pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memadai dan penyajian saldo asset tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp 2.112.224.096.841,75,- tidak andal, Penyajian saldo tagihan piutang penjualan angsuran sebesar Rp 3.123.402.658, dan saldo bagian lancar tagihan piutang angsuran sebesar Rp 0,00 tidak andal.

Tidak hanya itu, kata Tony, penyajian saldo kemitraan pihak ketiga sebesar Rp 95.383.000,- tidak andal, penyajian saldo asset lain-lain per 31 Desember 2010 sebesar Rp 74.345.453.842,59 tidak andal, penyajian anggaran dan realisasi pendapatan

daerah sebesar Rp. 35.590.439.887,38 dan belanja daerah minimal sebesar Rp. 83.938.669.106,- tidak sesuai standar akuntansi pemerintah.

Selain itu juga, kata Tony, penyajian realisasi belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp. 4.054.320.344,29 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso tidak wajar dan terakhir implementasi mekanisme penyaluran belanja bantuan keuangan kepada parpol tahun anggaran 2010 sebesar Rp.1.045.883.187,- tidak sesuai ketentuan.

Oleh sebab itu, Tony menyarankan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah Provinsi melalui Gubernur. Yakni Gubernur sebagai penanggung jawab utama SKPD harus bersikap tegas kepada pimpinan SKPD yang tidak melaksanakan rekomendasi temuan BPK. Bahkan kalau perlu memberikan sanksi kepada pimpinan SKPD yang melakukan kesalahan berulang-ulang.

Selain itu, Pansus LHP BPK juga menyarankan agar pemerintah provinsi Kalimantan Barat agar segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui TP/TGR kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya majelis pertimbangan TP/TGR dapat membedakan kasus yang memang merupakan tugas majelis pertimbangan dan kasus mana yang masih dalam proses tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Tidak hanya itu, kata Tony, pansus juga meminta Gubernur untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi majelis pertimbangan TP/TGR dan memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melakukan Pengawasan secara intensif kepada SKPD-SKPD yang ada.

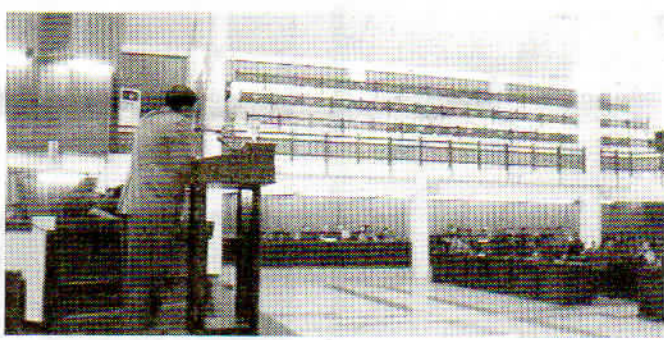
"Pansus meminta Gubernur agar memerintahkan para pimpinan SKPD yang mendapat temuan dari BPK, segera menindaklanjuti temuan tersebut untuk penyelesaiannya," tegas Tony.

Lebih lanjut, menurut legislator PAN ini juga meminta gubernur secara tegas melarang pimpinan SKPD membuka rekening-rekening liar apapun alasannya karena dapat menjadi sumber penyimpangan-penyimpangan.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kerugian Daerah/ Negara dengan mengintensifkan pembinaan dan pengendalian terhadap aparat pemerintah," ungkap Tony.

Menurut politisi daerah Kabupaten Sambas ini juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hendaknya dapat memaksimalkan fungsi Inspektorat dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK dengan memberikan dukungan pendanaan yang memadai. Sehingga Inspektorat dapat bekerja lebih optimal.

Ditambahkannya, semua pemasukan yang bersumber dari kerugian keuangan daerah agar disetor tunai ke Kas Daerah. Selain itu, lan-



LHP BPK

Ketua Pansus LHP BPK, Tony Kurniadi membacakan hasil Pansus kepada eksekutif dalam sidang paripurna di DPRD Kalbar. FOTO : Yulan Mirza / Borneo Tribune

jut Tony, adanya pendapatan retribusi perizinan tertentu berupa retribusi izin penggunaan peruntukan tanah dengan kode rekening 1.20.03.00.00.4.1.2.3.01 yang terealisasi sebesar Rp 8.621.135.000,00 atau meningkat 2.155,28 % dari yang dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,00. Oleh karena itu, pansus meminta kepada inspektorat untuk menelusuri keabsahan penerimaan tersebut untuk kemudian segera diklarifikasi ke BPK.

Dikatakannya lagi, pemerintah provinsi Kalbar hendaknya bersikap tegas kepada para pihak yang telah menimbulkan terjadinya kerugian Daerah/Negara dengan cara meminta pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang direkomendasikan oleh BPK.

"Pemprov Kalbar hendaknya dapat bersikap tegas kepada para kontraktor yang melaksanakan pekerjaan/proyek yang tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan atau

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada," paparnya.

Ditambahkannya lagi, Pemprov Kalbar agar segera melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap aset sesuai dengan rekomendasi dan audit BPK, dan apabila dalam pelaksanaannya masih didapat persoalan-persoalan yang nantinya berdampak pemprov sulit untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa pengecualian(WTP).

"Maka DPRD Provinsi Kalbar untuk dapat membentuk Pansus Aset sebagai sebuah komitmen bersama agar aset pemerintah Provinsi terdata dan tertata dengan baik secara keseluruhan," jelasnya.

Dan terakhir, Ketua Pansus LHP BPK RI ini juga meminta kepada tim tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk bekerja terus menerus sepanjang tahun guna menindak lanjuti laporan hasil temuan Pemeriksaan BPK-RI, dan laporannya ditembuskan ke DPRD Provinsi Kalbar. □